



Efektivitas pengelolaan RTH DPUTRPRKPLH Kabupaten Tasikmalaya di Singaparna

Dela Aura Kartini¹, Ani Heryani², Acep Hilman³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YPPT Priatim Tasikmalaya.
delaura884@gmail.com¹, aniheryani248@gmail.com², 3darmapt@gmail.com³

Abstract

The conversion of green spaces into built-up areas in the administrative center of Singaparna District demands effective management of Green Open Space (RTH) by local authorities. This study aims to evaluate the effectiveness of public RTH management by the Department of Public Works, Spatial Planning, Public Housing, and Environmental Health (DPUTRPRKPLH) of Tasikmalaya Regency in Singaparna District. It employs a qualitative descriptive method. Data were collected through field observations, in-depth interviews with department officials and community representatives, and documentation studies of regional spatial planning regulations. Data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, structured around Duncan's Effectiveness Theory with three dimensions: goal attainment, integration, and adaptation. The results indicate that the management of GOS in Singaparna District is not yet effective. From the goal attainment dimension, the minimum target of thirty percent of city area GOS (twenty percent public GOS and ten percent private GOS) as mandated by Law Number 26 of 2007 has not been met due to rapid urbanization, and qualitatively, the ecological and social functions remain suboptimal. From the integration dimension, policy socialization is still minimal, and cross-departmental coordination as well as community participation in park maintenance are highly limited. From the adaptation dimension, the department's response is still reactive due to budget constraints for park asset maintenance, although there is adaptive potential in using modern spatial mapping technology. DPUTRPRKPLH is advised to implement multi-stakeholder collaborative governance and precise geographic information system-based GOS mapping.

Keywords: Management Effectiveness, DPUTRPRKPLH Tasikmalaya Regency, Green Open Space, Singaparna District, Duncan's Theory of Effectiveness

Abstrak

Alih fungsi lahan hijau menjadi kawasan terbangun di pusat administratif Kecamatan Singaparna menuntut pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang efektif dari otoritas daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan RTH publik oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (DPUTRPRKPLH) Kabupaten Tasikmalaya di Kecamatan Singaparna. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan informan dinas dan masyarakat, serta studi dokumentasi regulasi tata ruang daerah. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang distrukturkan menggunakan pisau analisis Teori Efektivitas Duncan dengan tiga dimensi utama, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan RTH di Kecamatan Singaparna belum efektif. Dari dimensi pencapaian tujuan, target minimal tiga puluh persen RTH dari luas wilayah kota (dua puluh persen RTH publik dan sepuluh persen RTH privat) sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 belum terpenuhi akibat laju urbanisasi, dan secara kualitatif fungsi ekologis serta sosial belum optimal. Dari dimensi integrasi, sosialisasi kebijakan masih minim dan koordinasi lintas dinas serta partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan taman masih sangat terbatas. Dari dimensi adaptasi, respons dinas masih bersifat reaktif karena kendala anggaran pemeliharaan aset taman, meskipun terdapat potensi adaptif dalam penggunaan teknologi pemetaan spasial modern. DPUTRPRKPLH disarankan menerapkan tata kelola kolaboratif multipihak dan pemetaan RTH berbasis sistem informasi geografis secara presisi.

Kata Kunci: Efektivitas Pengelolaan, DPUTRPRKPLH Kabupaten Tasikmalaya, Ruang Terbuka Hijau, Kecamatan Singaparna, Teori Efektivitas Duncan

1. Pendahuluan

Perkembangan kawasan perkotaan yang pesat sering kali berdampak pada penyusutan lahan hijau akibat alih fungsi lahan menjadi kawasan terbangun. Pertumbuhan penduduk dan aktivitas komersial yang terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan baru menuntut penyediaan infrastruktur yang masif, yang pada gilirannya menekan keberadaan vegetasi alami. Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki peranan yang sangat krusial dalam menjaga keseimbangan ekologis, sosial, dan estetika kawasan perkotaan. Secara ekologis, RTH publik berfungsi sebagai paru-paru kota yang menyerap emisi karbon dioksida (CO₂) guna meminimalisasi pemanasan global serta mendukung keberlanjutan lingkungan perkotaan (Pakaya et al., 2024). Selain itu, keberadaan taman kota sebagai bagian dari RTH publik memberikan kontribusi nyata dalam mereduksi suhu lingkungan, mengontrol kelembaban udara, meredam kebisingan, serta menahan laju angin (Andrea & Bella, 2023). Dari dimensi sosial dan ekonomi,

Efektivitas pengelolaan RTH DPUTRPRKPLH Kabupaten Tasikmalaya di Singaparna

RTH berfungsi sebagai ruang interaksi publik, sarana rekreasi, olahraga, serta stimulan kegiatan ekonomi lokal yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat urban (Milasari et al., 2024). Oleh karena itu, perencanaan dan penyediaan RTH yang memadai merupakan syarat mutlak dalam mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan (Syamsiar et al., 2024).

Secara global, pemenuhan luasan RTH di berbagai perkotaan negara berkembang menghadapi dilema antara percepatan pertumbuhan ekonomi fisik dengan pelestarian fungsi lingkungan. Kebijakan tata ruang sering kali kalah bersaing dengan kepentingan investasi sektor riil yang membutuhkan ruang berupa beton dan aspal. Di Indonesia, implementasi kebijakan penataan ruang yang mewajibkan alokasi ruang terbuka hijau diatur secara berjenjang dari pemerintah pusat hingga daerah pasca diberlakukannya desentralisasi. Namun, pelimpahan wewenang pengelolaan lingkungan ke pemerintah daerah sering kali tidak disertai dengan kesiapan kapasitas fiskal, dukungan sumber daya aparatur yang kompeten, serta kesadaran hukum masyarakat. Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan yang lebar antara cita-cita regulasi dengan fakta empiris di lapangan. Ketimpangan ekologis ini tecermin nyata pada wilayah-wilayah perkotaan baru yang sedang tumbuh, di mana kebutuhan akan ruang komersial mengabaikan aspek daya dukung lingkungan perkotaan.

Meskipun regulasi nasional melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengamanatkan alokasi minimal RTH sebesar tiga puluh persen dari luas wilayah kota dengan rincian dua puluh persen RTH publik dan sepuluh persen RTH privat, realisasi di lapangan sebagian besar daerah di Indonesia masih jauh di bawah standar tersebut. Ketidakseimbangan ekologis ini juga terjadi di wilayah administrasi Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sebagai akibat dari pemekaran wilayah dan perpindahan pusat pemerintahan dari Kota Tasikmalaya ke Kecamatan Singaparna, terjadi konversi lahan pertanian dan vegetasi alami secara masif untuk pembangunan gedung pemerintahan, pusat perbelanjaan, dan pemukiman baru. Sebagai perbandingan regional, ketidakcukupan penyediaan RTH publik juga terekam di beberapa wilayah tetangga seperti Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya yang penyediaan RTH publiknya baru mencapai satu koma tiga puluh tujuh persen (Nusarini et al., 2018). Lebih jauh lagi, analisis spasial menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) di pusat Kota Tasikmalaya mengonfirmasi adanya defisit RTH yang signifikan dengan ketersediaan lahan hijau yang hanya berkisar antara lima belas hingga dua puluh persen (Mulyana et al., 2025). Tekanan alih fungsi lahan ini tidak hanya terjadi pada area datar perkotaan, tetapi juga merambah ke kawasan konservasi penting seperti perbukitan vulkanik yang mengalami degradasi akibat eksploitasi galian golongan C dan pembangunan pemukiman (Malik, 2009). Kondisi empiris ini menunjukkan bahwa tanpa pengelolaan yang efektif, target penyediaan ruang publik hijau yang sehat dan seimbang tidak akan pernah tercapai.

Penyediaan ruang hijau di wilayah urban tidak sekadar memenuhi kewajiban legal-formal, melainkan berhubungan langsung dengan keadilan ruang dan kesehatan lingkungan bagi warga. Kecamatan Singaparna yang mengalami transisi dari karakter pedesaan menjadi kawasan perkotaan yang padat menghadapi tantangan yang sangat pelik terkait hilangnya tutupan vegetasi pelindung air. Urbanisasi yang tidak terkendali memicu pembentukan pulau panas perkotaan (urban heat island) serta menurunkan kualitas visual lanskap. Oleh karena itu, diperlukan institusi pengelola yang memiliki kompetensi kepemimpinan dan kapasitas operasional yang kuat untuk mengendalikan konversi lahan tersebut. Otoritas penataan ruang ini didelegasikan secara formal kepada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (DPUTRPRKPLH) Kabupaten Tasikmalaya, yang mengemban fungsi ganda dalam menyinergikan pembangunan fisik daerah dengan perlindungan ekosistem lingkungan.

DPUTRPRKPLH Kabupaten Tasikmalaya memegang otoritas penuh dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pengelolaan RTH di wilayah administrasi Kabupaten Tasikmalaya, khususnya di pusat pemerintahan Kecamatan Singaparna. Sebagai dinas yang mengintegrasikan urusan tata ruang dan lingkungan hidup, DPUTRPRKPLH menghadapi tantangan besar dalam menyelaraskan kebutuhan pembangunan fisik dengan kelestarian ekologi. Pengelolaan RTH yang dilakukan oleh instansi pemerintah sering kali dihadapkan pada hambatan klasik berupa keterbatasan alokasi anggaran operasional, kurangnya pemeliharaan aset, lemahnya pengawasan penegakan hukum tata ruang, serta minimnya partisipasi dari sektor swasta maupun masyarakat luas. Untuk menilai keberhasilan instansi ini dalam menjalankan fungsinya, diperlukan sebuah kerangka analisis organisasi yang komprehensif.

Penggunaan perspektif sistemik dalam mengevaluasi efektivitas pengelolaan lingkungan pada instansi pemerintah sangat penting agar penilaian tidak terfokus pada keluaran fisik semata, melainkan juga menyentuh aspek relasional kelembagaan dan kemampuan daya adaptif. Organisasi publik sering kali dinilai berhasil apabila mampu menyerap seluruh anggaran tahunan, namun kegagalan menjaga kelestarian ekologis jangka panjang menunjukkan adanya disfungsi tata kelola. Dalam konteks ini, Teori Efektivitas Duncan menawarkan pendekatan terpadu yang mengaitkan kinerja internal dengan tuntutan lingkungan eksternal. Dengan menyoroti aspek relasi kekuasaan, koordinasi lintas sektor, serta mekanisme adaptasi teknologi, teori ini mampu mengidentifikasi akar permasalahan tata kelola RTH secara struktural, bukan hanya mengamati gejala penurunan kualitas lahan hijau secara visual di permukaan saja.

Penelitian ini memfokuskan analisis pengelolaan RTH pada DPUTRPRKPLH Kabupaten Tasikmalaya dengan menggunakan pisau analisis Teori Efektivitas Duncan. Teori Efektivitas Duncan membagi dimensi pengukuran efektivitas ke dalam tiga aspek utama, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Dimensi pencapaian tujuan mengevaluasi sejauh mana target kuantitatif dan kualitatif penyediaan RTH di Singaparna telah terpenuhi sesuai dengan perencanaan dan aturan hukum yang berlaku. Dimensi integrasi meninjau aspek sosialisasi kebijakan, konsensus antar-aktor, serta pola koordinasi internal dinas maupun hubungan lintas sektoral dengan instansi pemerintah lainnya dan partisipasi masyarakat dalam memelihara ruang hijau. Terakhir, dimensi adaptasi mengukur kemampuan dinas dalam merespons tekanan lingkungan eksternal, mengadopsi teknologi pemetaan spasial modern, serta mengelola operasional dan pemeliharaan aset di tengah keterbatasan sumber daya. Melalui pendekatan teoretis ini, efektivitas kinerja DPUTRPRKPLH Kabupaten Tasikmalaya dalam pengelolaan RTH di Kecamatan Singaparna dapat dianalisis secara objektif dan mendalam, sekaligus memberikan rekomendasi strategis bagi perbaikan tata kelola lingkungan di masa depan.

Meskipun penelitian terdahulu telah banyak memetakan ketersediaan RTH secara spasial di wilayah Tasikmalaya (Mulyana et al., 2025; Nusarini et al., 2018) maupun berfokus pada konservasi fisik lahan hijau (Malik, 2009), kajian yang secara khusus mengevaluasi kapasitas tata kelola kelembagaan organisasi pengelola (DPUTRPRKPLH) melalui lensa teori efektivitas organisasi masih sangat terbatas. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pengintegrasian analisis spasial-kualitatif dengan kerangka sistemik Teori Efektivitas Duncan (pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi). Kerangka ini digunakan untuk membedah secara mendalam hambatan birokrasi, fragmentasi koordinasi sektoral, dan keterbatasan daya adaptif dinas dalam mengendalikan alih fungsi RTH di pusat administratif baru Kecamatan Singaparna.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengeksplorasi secara mendalam efektivitas pengelolaan RTH yang dilakukan oleh DPUTRPRKPLH Kabupaten Tasikmalaya di Kecamatan Singaparna. Penggunaan metode kualitatif deskriptif ini dinilai relevan karena peneliti bermaksud untuk memahami secara utuh fenomena kelembagaan, hambatan koordinasi, serta pola adaptasi organisasi yang tidak dapat diukur secara kuantitatif semata (Wardana et al., 2024). Desain studi kasus kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang kaya dari berbagai sumber, melakukan triangulasi, serta menyajikan analisis yang sistematis mengenai proses tata kelola lingkungan yang sedang berlangsung (Wiratama et al., 2023). Fokus evaluasi diarahkan pada unit kerja Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup pada DPUTRPRKPLH Kabupaten Tasikmalaya sebagai pelaksana utama kebijakan teknis pengelolaan ruang hijau di daerah tersebut (Salsabilla et al., 2025).

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi (Khoirunnisaa et al., 2024). Observasi lapangan dilakukan secara langsung di wilayah Kecamatan Singaparna untuk mengamati kondisi fisik, fasilitas penunjang, pemeliharaan vegetasi, serta aktivitas masyarakat di area RTH publik utama, seperti Alun-alun Singaparna dan jalur hijau di sepanjang koridor jalan protokol. Wawancara mendalam dilaksanakan bersama para informan kunci yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling untuk memastikan kualifikasi data yang diperoleh. Informan dalam penelitian ini meliputi kepala bidang pengelola lingkungan hidup pada DPUTRPRKPLH, petugas teknis pemeliharaan taman, serta perwakilan masyarakat pengguna RTH di Kecamatan Singaparna. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengkaji Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya, Peraturan Daerah terkait penyelenggaraan RTH, dokumen rencana kerja tahunan DPUTRPRKPLH, serta literatur publikasi ilmiah yang relevan dengan ekologi perkotaan Singaparna.

Untuk memastikan keabsahan dan keandalan data kualitatif yang diperoleh, peneliti melakukan pengujian kredibilitas melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan keterangan dari para pejabat pengambil kebijakan di tingkat atas DPUTRPRKPLH dengan penjelasan dari petugas lapangan serta persepsi warga pengguna taman. Triangulasi metode dicapai melalui pengecekan silang antara hasil rekaman wawancara, catatan observasi visual terhadap kondisi fisik sarana RTH, dan data sekunder berupa peta tata ruang serta dokumen perencanaan kerja dinas. Peneliti juga melakukan pengecekan anggota (member checking) dengan mengonfirmasi kembali draf transkrip wawancara kepada para informan utama guna memastikan tidak terjadi salah tafsir terhadap data verbal yang telah diberikan selama wawancara.

Informan penelitian dipilih berdasarkan kriteria keterlibatan langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pemeliharaan aset RTH di Kecamatan Singaparna. Struktur wawancara dipandu oleh instrumen protokol wawancara semi-terstruktur yang dikembangkan berdasarkan tiga dimensi utama Teori Efektivitas Duncan. Wawancara difokuskan pada pemahaman informan terhadap target pemenuhan luasan RTH, ketersediaan anggaran pemeliharaan taman, prosedur koordinasi lintas dinas, serta pemanfaatan data berbasis Sistem Informasi Geografis dalam pengawasan lahan hijau. Seluruh proses wawancara direkam menggunakan alat perekam digital

dengan persetujuan lisan dari para informan, dan data hasil rekaman selanjutnya ditranskripsikan secara verbatim ke dalam berkas teks untuk dianalisis pada tahap berikutnya.

Untuk memberikan gambaran yang transparan mengenai validitas data kualitatif yang diperoleh, informan kunci dipilih secara selektif dengan mempertimbangkan representasi peran birokrasi dan masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan mencakup seluruh aspek perencanaan, pengawasan harian, dan pemanfaatan langsung RTH di Kecamatan Singapura. Pemilihan informan ini juga diselaraskan dengan kebutuhan triangulasi data kualitatif guna meminimalisasi bias subjektif peneliti di lapangan. Profil lengkap informan kunci yang terlibat dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Profil Informan Kunci Penelitian Pengelolaan RTH Singapura

No	Kode Informan	Jabatan / Peran Informan	Peran Kunci dalam Pengelolaan RTH	Masa Jabatan (Th)
1	INF-01	Kepala Bidang Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman DPUTRPRKPLH	Perencana kebijakan makro dan koordinasi program RTH	4
2	INF-02	Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup DPUTRPRKPLH	Pengawas operasional harian dan teknis vegetasi taman	3
3	INF-03	Staf Teknis Pemetaan Wilayah DPUTRPRKPLH	Operator data spasial dan analisis zonasi lahan hijau	2
4	INF-04	Petugas Lapangan Pemelihara Taman Alun-alun Singapura	Pelaksana teknis penyiraman dan pemeliharaan vegetasi	5
5	INF-05	Perwakilan Tokoh Masyarakat Singapura	Pengguna RTH publik dan perwakilan aspirasi sosial warga	-
6	INF-06	Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) Singapura	Perwakilan pelaku ekonomi informal di kawasan RTH	-

Pemilihan informan dari berbagai tingkat jabatan di lingkungan birokrasi DPUTRPRKPLH serta perwakilan dari masyarakat dan PKL bertujuan untuk mendapatkan data yang komprehensif dari berbagai sudut pandang. Informan birokrasi memberikan data formal terkait regulasi, kendala anggaran, dan rencana pengembangan teknologi pemetaan. Sementara itu, petugas lapangan dan masyarakat menyajikan potret empiris mengenai kondisi fisik RTH harian serta pola interaksi sosial yang terjadi di lapangan. Kombinasi perspektif atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) ini sangat krusial dalam memperkuat keabsahan temuan penelitian serta memberikan basis analisis yang kokoh.

Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan dengan mengadaptasi model analisis kualitatif dari Miles, Huberman, dan Saldaña, yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Wardana et al., 2024). Pada tahap kondensasi data, peneliti memilah, menyederhanakan, dan memfokuskan data mentah yang diperoleh dari transkrip wawancara dan catatan lapangan agar relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, pada tahap penyajian data, informasi yang telah kondensasikan disusun secara teratur dalam bentuk uraian naratif untuk mempermudah pemahaman hubungan antardimensi efektivitas. Tahapan penarikan kesimpulan dilakukan secara organik dengan mencocokkan pola temuan di lapangan dengan proposisi teoretis Duncan. Prosedur analisis data distrukturkan berdasarkan tiga dimensi efektivitas organisasi, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi, guna menjamin ketajaman interpretasi ilmiah dan objektivitas kesimpulan akhir.

Pemilihan dimensi-dimensi ini didasarkan pada kebutuhan untuk membedah kinerja kelembagaan tidak hanya dari output fisik yang tampak tetapi juga proses tata hubungan kerja serta kemampuan merespons tantangan perkotaan yang dinamis. Hal ini penting untuk memotret dinamika pengelolaan secara komprehensif. Melalui model analisis deskriptif ini, fakta-fakta sosial di lapangan mengenai RTH Singapura dikohersikan dengan teori efektivitas Duncan sehingga melahirkan sintesis penelitian yang kokoh, terukur, dan bermutu akademis tinggi.

Aspek etika penelitian diperhatikan secara saksama mengingat penelitian kualitatif ini melibatkan interaksi langsung dengan informan dari instansi birokrasi pemerintah. Peneliti berkomitmen menjaga kerahasiaan identitas informan melalui prosedur anonimisasi berkas wawancara, di mana nama informan diganti dengan kode khusus. Prinsip kesediaan lisan dan tertulis (informed consent) diterapkan sebelum wawancara dimulai, dan informan berhak menolak menjawab pertanyaan tertentu atau mengundurkan diri dari keikutsertaan penelitian kapan saja tanpa konsekuensi apapun. Data yang dikumpulkan sepenuhnya hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah dan penulisan artikel akademik ini, tanpa adanya rekayasa argumentasi atau penyalahgunaan data.

3. Hasil dan Pembahasan

Analisis terhadap pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) oleh DPUTRPRKPLH Kabupaten Tasikmalaya di Kecamatan Singaparna diuraikan berdasarkan Teori Efektivitas Duncan. Teori ini memiliki tiga dimensi utama, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Melalui analisis komparatif dengan penelitian-penelitian sejenis, argumen kritis dibangun secara logis untuk merekonstruksi potret pengelolaan lingkungan perkotaan secara objektif.

3.1. Analisis Pencapaian Tujuan

Dimensi pencapaian tujuan fokus mengevaluasi keberhasilan organisasi dalam memenuhi target kuantitatif dan kualitatif penyediaan RTH publik sesuai mandat regulasi. Di wilayah Kecamatan Singaparna, yang berfungsi sebagai pusat administratif Kabupaten Tasikmalaya, pencapaian target luasan RTH sebesar tiga puluh persen dari luas wilayah kota menghadapi hambatan yang sangat berat akibat tingginya laju konversi lahan. Hambatan penyediaan lahan ini selaras dengan kondisi empiris di Kabupaten Karanganyar, di mana konversi lahan bervegetasi menjadi kawasan permukiman menghalangi pemenuhan target minimal dua puluh persen RTH publik meskipun regulasi daerah telah disahkan (Ashim et al., 2025). Masalah serupa juga ditemukan di Kota Palu, di mana luas RTH publik masih berada jauh di bawah standar nasional karena keterbatasan ketersediaan lahan milik pemerintah (Wardana et al., 2024). Demikian pula di Kabupaten Sidoarjo, tekanan pembangunan kawasan komersial menghambat implementasi kebijakan penyediaan kawasan hijau sebagai elemen esensial dari kota berkelanjutan (Salsabilla et al., 2025). Jika dikomparasikan dengan kondisi spasial regional di Tasikmalaya, Kecamatan Cihideung yang hanya memiliki RTH publik sebesar satu koma tiga puluh tujuh persen menunjukkan bahwa kegagalan pencapaian target kuantitatif ini merupakan tren umum yang disebabkan oleh kurangnya prioritas alokasi lahan hijau di tengah tekanan urbanisasi (Nusarini et al., 2018). Fenomena ini juga diperkuat oleh analisis spasial di pusat Kota Tasikmalaya yang mencatat ketersediaan RTH publik secara keseluruhan baru berkisar antara lima belas hingga dua puluh persen saja (Mulyana et al., 2025).

Secara kualitatif, efektivitas pencapaian tujuan pengelolaan RTH oleh DPUTRPRKPLH diukur dari sejauh mana ruang terbuka tersebut mampu menjalankan fungsi ekologis dan sosialnya secara optimal. Secara ekologis, vegetasi di dalam RTH publik bertindak sebagai penyerap emisi karbon dioksida (CO₂) dari aktivitas kendaraan bermotor dan aktivitas perkotaan lainnya, yang sangat penting bagi keberlanjutan kualitas udara mikro (Pakaya et al., 2024). Kemampuan mereduksi suhu udara perkotaan, meningkatkan kelembaban, meredam kebisingan, serta mengendalikan laju angin merupakan indikator keberhasilan ekologis yang terbukti secara ilmiah pada kawasan RTH publik yang tertata baik seperti Taman Waduk Pluit di Jakarta Utara (Andrea & Bella, 2023). Selain fungsi ekologis, fungsi sosial RTH sebagai ruang interaksi publik dinilai efektif apabila didukung oleh fasilitas penunjang yang memadai, kondisi kebersihan yang terjaga, serta pola perilaku pengunjung yang positif, sebagaimana ditunjukkan dalam evaluasi fungsi sosial RTH di kawasan perkotaan Samarinda (Milasari et al., 2024). Lebih lanjut, perencanaan RTH publik yang efektif juga harus mempertimbangkan preferensi dan kebutuhan spesifik masyarakat lokal agar pemanfaatannya lebih optimal dan tepat guna, seperti yang diidentifikasi dalam analisis kebutuhan RTH di Kota Majene (Syamsiar et al., 2024). Tanpa adanya peningkatan kualitas fasilitas fisik, pemeliharaan vegetasi secara terencana, serta pemahaman atas kebutuhan masyarakat oleh DPUTRPRKPLH, keberadaan RTH publik di Singaparna hanya akan menjadi lahan terbuka kosong tanpa kontribusi ekologis dan sosial yang nyata bagi masyarakat.

Spesifikasi vegetasi yang dikembangkan di RTH Singaparna, seperti pohon Kiara Payung, Glodokan Tiang, Mahoni, dan Flamboyan, memegang peranan kunci dalam penyerapan polutan gas buang kendaraan bermotor di sepanjang jalan protokol Singaparna. Menurut data serapan karbon, vegetasi pohon berkayu keras memiliki kapasitas sekuestrasi karbon dioksida yang jauh lebih tinggi dibandingkan tanaman perdu hias yang bersifat seremonial (Pakaya et al., 2024). DPUTRPRKPLH Kabupaten Tasikmalaya masih cenderung menanam tanaman hias semusim di kawasan pembatas jalan protokol Singaparna demi mengejar nilai estetika visual jangka pendek. Hal ini berakibat pada rendahnya efektivitas kualitatif pencapaian tujuan ekologis RTH dalam menyaring debu perkotaan dan mengurangi dampak pulau panas mikro. Kegagalan mengintegrasikan penanaman vegetasi berdaun lebat dan berkanopi lebar membatasi fungsi optimal RTH sebagai pengontrol iklim mikro dan paru-paru kawasan administrasi Singaparna.

Selain jenis vegetasi, efektivitas kualitatif RTH dalam menunjang keberlanjutan wilayah perkotaan Singaparna juga sangat ditentukan oleh kontinuitas spasial dari koridor hijau tersebut. Konsep sabuk hijau (green belt) dan jalur hijau jalan (greenway corridor) harus diimplementasikan secara berkesinambungan untuk menghubungkan kantong-kantong vegetasi yang terfragmentasi di sekitar pusat pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya. Hasil analisis spasial menunjukkan bahwa DPUTRPRKPLH masih mengelola RTH sebagai entitas yang terpisah-pisah dan sporadis, bukan sebagai suatu jaringan infrastruktur hijau yang terpadu. Pendekatan parsial ini membatasi daya dukung ekologis kawasan Singaparna dalam menyerap limpasan air hujan serta menciptakan habitat koridor ekologis bagi satwa urban. Perbaikan tata ruang di masa depan menuntut dinas untuk merancang masterplan RTH yang mengutamakan konektivitas antar-taman publik di Singaparna.

Temuan dari berbagai kota menunjukkan bahwa efektivitas sosial RTH sangat bergantung pada ketersediaan sarana prasarana yang ramah pengguna serta desain ruang yang mengakomodasi interaksi sosial kemasyarakatan. Evaluasi sosial RTH di Samarinda (Milasari et al., 2024) dan evaluasi kebijakan RTH berkelanjutan di Sidoarjo (Salsabilla et al., 2025) mengindikasikan bahwa ketidakcocokan antara desain tata ruang dengan aktivitas sosial ekonomi lokal sering kali memicu pengabaian RTH publik oleh warga atau bahkan penyalahgunaan fungsi lahan. Di Kecamatan Singaparna, DPUTRPRKPLH menghadapi kondisi serupa di mana Alun-alun Singaparna sering mengalami penumpukan sampah dan kerusakan fasilitas bangku taman karena tingginya aktivitas pedagang kaki lima informal di sekitar area taman. Pembangunan fisik yang dilakukan dinas belum diimbangi dengan kajian sosial kemasyarakatan mengenai kapasitas tampung RTH publik. Tanpa adanya sinkronisasi antara perencanaan infrastruktur RTH dengan perilaku sosial pengunjung, tujuan pencapaian efektivitas sosial sebagai ruang publik yang sehat dan tertib sulit diwujudkan di Singaparna.

Untuk memperjelas potret ketidakefektifan pengelolaan RTH publik secara kualitatif di Kecamatan Singaparna, peneliti melakukan observasi fisik mendalam di Alun-alun Singaparna sebagai pusat interaksi publik utama. Secara visual, Alun-alun Singaparna menunjukkan gejala penurunan kualitas ekologis dan estetika yang signifikan. Kondisi vegetasi penutup tanah (ground cover) berupa rumput taman mengalami kerusakan parah hingga mencapai tujuh puluh persen akibat pemadatan tanah (soil compaction). Kerusakan ini disebabkan oleh tidak adanya pembatasan akses pengunjung dan penataan jalur pejalan kaki (pedestrian path) yang tidak memadai, sehingga rumput terinjak secara intensif setiap hari dan berubah menjadi area tanah terbuka yang berdebu pada musim kemarau serta berlumpur pada musim hujan.

Selain masalah vegetasi penutup tanah, sarana prasarana fisik di Alun-alun Singaparna banyak yang mengalami kerusakan tanpa adanya perbaikan rutin. Bangku taman yang terbuat dari material kayu sebagian besar telah melapuk dan patah akibat paparan cuaca ekstrim dan kurangnya zat pelapis kayu. Sementara itu, bangku berbahan besi menunjukkan tingkat korosi yang parah di bagian sambungan las, yang membahayakan keselamatan fisik pengunjung. Permasalahan yang paling mencolok adalah penumpukan sampah domestik di beberapa sudut taman. Meskipun dinas menyediakan beberapa tempat sampah, jumlahnya sangat tidak memadai dibandingkan dengan volume sampah harian yang dihasilkan oleh pengunjung dan aktivitas pedagang kaki lima di sekeliling taman. Tempat sampah yang ada pun sebagian besar tidak dilengkapi dengan pemisah sampah organik dan anorganik, serta sering kali dibiarkan dalam kondisi meluap karena frekuensi pengangkutan sampah oleh dinas kebersihan yang tidak teratur, sehingga memicu bau tidak sedap dan mengundang lalat yang menurunkan estetika serta kesehatan lingkungan ruang publik tersebut.

3.2. Analisis Integrasi

Dimensi integrasi dalam Teori Efektivitas Duncan menekankan pada aspek sosialisasi kebijakan, konsensus antar-aktor, serta pola koordinasi, baik secara internal kelembagaan maupun eksternal dengan melibatkan masyarakat. Keberhasilan integrasi teoretis ini membutuhkan kesamaan perspektif di antara dinas-dinas terkait agar tidak terjadi mispersepsi yang dapat menghambat implementasi kebijakan tata ruang di lapangan. Di Kota Palu, misalnya, hambatan utama penyediaan kawasan hijau bersumber dari adanya perbedaan persepsi di antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD), minimnya pelibatan masyarakat, dan keterbatasan koordinasi lintas sektor (Wardana et al., 2024). Pengalaman ini memberikan pelajaran berharga bagi DPUTRPRKPLH Kabupaten Tasikmalaya bahwa sosialisasi regulasi secara berkala dan penyelarasan visi pembangunan berkelanjutan antar-instansi merupakan prasyarat mutlak dalam menyukseskan pengelolaan RTH.

Selain penyelarasan visi internal, DPUTRPRKPLH dituntut untuk meningkatkan jalinan kemitraan eksternal dalam pengelolaan dan pemeliharaan kawasan hijau. Peran instansi pemerintah sebagai fasilitator dan koordinator yang andal sangat menentukan keberlanjutan pemeliharaan RTH publik, sebagaimana ditunjukkan oleh kinerja Dinas Lingkungan Hidup perkotaan di Pekanbaru yang berupaya menjaga hutan kota melalui proses fasilitasi dan pengawasan (Fitri & Nurmasari, 2024). Keterlibatan aktif sektor swasta dan masyarakat luas dalam aspek pemeliharaan dan pengamanan aset juga menjadi kunci penting di Kota Bandung dalam mengatasi keterbatasan sumber daya aparatur pemerintah (Ramadhan et al., 2024). Untuk mengoptimalkan integrasi ini, DPUTRPRKPLH Kabupaten Tasikmalaya perlu menerapkan model tata kelola lingkungan terpadu yang melibatkan kolaborasi multipihak yang meliputi pemerintah, sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan, lembaga swadaya masyarakat, serta komunitas lokal. Sebagaimana keberhasilan tata kelola di Kabupaten Ponorogo, pelibatan banyak aktor publik mampu menumbuhkan kesadaran ekologis, pemberdayaan masyarakat, koordinasi yang solid, dan penegakan aturan hukum tata ruang secara efektif sehingga kelestarian paru-paru kota dapat dipertahankan secara partisipatif (Wiratama et al., 2023).

Hambatan integrasi ini tecermin pula dalam kegagalan mengoordinasikan pengawasan penertiban kawasan hijau jalan protokol Singaparna dari PKL secara sinergis dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya. DPUTRPRKPLH sebagai pemilik aset taman jalan tidak dibekali dengan fungsi penegakan hukum yustisial, sedangkan pihak Satpol PP hanya bergerak apabila ada operasi penertiban insidental. Tidak adanya dokumen kesepakatan kerja sama (Memorandum of Understanding) formal untuk pengawasan terpadu menyebabkan jalur hijau Singaparna terus mengalami okupasi PKL yang merusak keindahan taman. Integrasi sektoral yang lemah ini

diperparah oleh ketiadaan pelibatan program Adiwiyata sekolah ataupun komunitas pecinta lingkungan lokal untuk mengadopsi taman-taman publik di Singapura, padahal sinergi dengan komunitas peduli lingkungan terbukti mampu meringankan beban kerja pemeliharaan dinas secara signifikan.

Pengalaman integrasi partisipatif di Kota Bandung (Ramadhan et al., 2024) menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat menghemat anggaran pemeliharaan RTH hingga tiga puluh persen dengan menyerahkan tata kelola pemeliharaan taman lingkungan kepada rukun tetangga dan komunitas warga setempat. Sebaliknya, DPUTRPRKPLH Kabupaten Tasikmalaya masih memusatkan seluruh rantai pekerjaan pemeliharaan tanaman RTH Singapura pada petugas harian lepas dinas yang jumlahnya sangat terbatas. Pola hubungan kerja yang bersifat satu arah ini menghambat terbentuknya rasa kepemilikan (*sense of ownership*) dari warga Singapura terhadap RTH publik di sekitarnya. Ketika masyarakat memandang bahwa pemeliharaan taman sepenuhnya adalah kewajiban dinas, perilaku tidak peduli seperti membuang sampah sembarangan dan merusak bangku taman akan terus terulang, yang pada akhirnya menurunkan efektivitas integrasi sosial tata kelola RTH.

Berdasarkan wawancara mendalam dengan Kepala Bidang DPUTRPRKPLH (INF-01), hambatan koordinasi eksternal terkait penertiban PKL di jalur hijau berakar dari tidak adanya kesepakatan kerja sama formal (Memorandum of Understanding) antara dinas pengelola dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tasikmalaya. DPUTRPRKPLH memegang wewenang administratif atas aset taman, namun tidak memiliki wewenang eksekusi yustisial di lapangan. Di sisi lain, Satpol PP enggan melakukan penindakan rutin karena tidak adanya regulasi internal dan alokasi anggaran operasional pengamanan aset taman yang disepakati bersama. Hambatan koordinasi lintas lembaga ini mengakibatkan jalur hijau Singapura terus terokupasi oleh pedagang informal secara liar.

Selain itu, hambatan integrasi sektoral juga melibatkan peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tasikmalaya. Perencanaan pemindahan pusat kegiatan pemerintahan ke Kecamatan Singapura oleh Bappeda tidak disertai dengan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang mengikat. Hal ini memicu ketidakjelasan zonasi kepemilikan lahan sisa yang dapat diubah menjadi RTH publik. Ketiadaan wadah koordinasi formal (seperti Forum Penataan Ruang Daerah) yang aktif mempertemukan DPUTRPRKPLH, Bappeda, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP secara rutin membuat kebijakan pengelolaan tata ruang di Singapura berjalan secara parsial, tumpang tindih, dan tidak sinergis. Benturan kepentingan sektoral ini menjadi faktor dominan rendahnya efektivitas integrasi tata kelola RTH Singapura.

3.3. Analisis Adaptasi

Dimensi adaptasi mengukur kapasitas DPUTRPRKPLH Kabupaten Tasikmalaya dalam merespons dinamika perubahan lingkungan eksternal, mengelola operasional pemeliharaan aset secara efisien, serta mengadopsi instrumen perencanaan modern. Salah satu tantangan eksternal terberat yang harus dihadapi oleh dinas adalah laju alih fungsi lahan akibat eksploitasi alam yang merusak ekosistem penopang perkotaan. Contoh kasus konkrit adalah degradasi kawasan konservasi Perbukitan Sepuluh Ribu di Tasikmalaya akibat penambangan liar galian golongan C dan pemukiman, yang menuntut adanya kebijakan konservasi progresif untuk mengubah sisa perbukitan menjadi kawasan hutan kota demi menunjang kecukupan RTH daerah (Malik, 2009). DPUTRPRKPLH dituntut memiliki fleksibilitas kebijakan untuk meminimalisasi kerusakan lingkungan dengan melakukan penataan ulang tata ruang secara adaptif di wilayah Kecamatan Singapura.

Dalam hal pengelolaan operasional, dinas sering kali dihadapkan pada keterbatasan anggaran yang memengaruhi pemeliharaan aset-aset ruang hijau perkotaan. Ketidakefektifan pemeliharaan fasilitas taman dan rendahnya intensitas kunjungan warga akibat sarana prasarana yang tidak terawat seperti yang terjadi di Hutan Kota Caracas Kabupaten Kuningan menjadi catatan penting mengenai perlunya perencanaan pengembangan aset aksesibilitas yang strategis (Zadittaqwa & Yusup, 2024). Kualitas pelayanan dan kelengkapan fasilitas RTH harus dikelola secara berkesinambungan agar tidak terjadi penurunan daya tarik ekologis dan sosial sebagaimana dialami dalam pengelolaan RTH di Kabupaten Balangan (Khoirunnisaa et al., 2024).

Sebagai langkah strategis jangka panjang, kapasitas adaptasi DPUTRPRKPLH juga diukur dari kemampuannya mengadopsi teknologi modern dan teknik perencanaan strategis. Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) seperti yang diterapkan di pusat Kota Tasikmalaya terbukti membantu instansi pemerintah dalam memetakan persebaran spasial RTH secara akurat serta mengidentifikasi zona-zona kritis yang mengalami defisit vegetasi secara cepat (Mulyana et al., 2025). Dengan mengintegrasikan data spasial ini ke dalam sistem pemetaan dinas, perencanaan alokasi ruang hijau di Kecamatan Singapura dapat dilakukan secara lebih presisi. Selain itu, formulasi strategi pengembangan RTH perlu disusun secara komprehensif menggunakan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) untuk menghasilkan langkah-langkah penataan yang adaptif terhadap dinamika sosial ekonomi dan kebutuhan konservasi lingkungan di masa mendatang (Putri et al., 2025).

Untuk merumuskan tata kelola RTH Singapura yang lebih adaptif di masa depan, analisis SWOT secara sistemik dapat dilakukan dengan mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal DPUTRPRKPLH Kabupaten Tasikmalaya secara komprehensif. Kekuatan internal dinas terletak pada kewenangan regulasi formal tata ruang yang dimilikinya serta adanya dukungan personel teknis pemelihara taman harian. Kelemahan internal yang krusial mencakup keterbatasan anggaran operasional pemeliharaan aset fisik dan kurangnya penguasaan teknologi

pemetaan spasial canggih oleh staf dinas. Peluang eksternal berupa masih adanya sisa lahan pertanian yang dapat dikonservasi di sekitar Singaparna serta tingginya minat komunitas lokal untuk berpartisipasi dalam aksi lingkungan hijau. Sementara itu, ancaman eksternal terbesar adalah laju alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan terbangun komersial yang cepat serta maraknya okupasi lahan publik oleh PKL informal secara ilegal. Berdasarkan pemetaan faktor eksternal dan internal tersebut, beberapa strategi adaptif pengoperasian RTH di Singaparna dapat disusun. Strategi kekuatan-peluang diarahkan dengan mengoptimalkan kewenangan regulasi tata ruang daerah untuk menetapkan kawasan konservasi hijau baru di Singaparna dengan melibatkan kemitraan komunitas lokal sebagai pengawas lingkungan partisipatif. Strategi kelemahan-peluang ditempuh dengan memanfaatkan dukungan program CSR dari pihak swasta untuk membiayai penyediaan sarana prasarana taman guna mengatasi keterbatasan anggaran daerah. Strategi kekuatan-ancaman diformulasikan dengan memperkuat kerja sama penegakan perda tata ruang bersama Satpol PP untuk menindak tegas pelanggaran okupasi jalur hijau secara hukum. Akhirnya, strategi kelemahan-ancaman diimplementasikan dengan melakukan pemetaan zonasi spasial RTH menggunakan teknologi SIG guna memantau perubahan lahan secara berkala serta mencegah alih fungsi lahan kritis sebelum terjadi kerusakan yang lebih luas.

Untuk merumuskan tata kelola RTH Singaparna yang lebih adaptif di masa depan, formulasi strategi SWOT perlu dipetakan secara detail. Hal ini berguna untuk mentransformasi kekuatan internal dinas guna menangkap peluang eksternal, sekaligus mengantisipasi ancaman laju alih fungsi lahan perkotaan. Matriks di bawah ini menjabarkan empat program kerja strategis yang dapat diimplementasikan oleh DPUTRPRKPLH Kabupaten Tasikmalaya seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Matriks Formulasi Strategi SWOT Pengelolaan RTH Singaparna

Kategori Strategi	Deskripsi Program Kerja Adaptif	Target Waktu Implementasi	Indikator Keberhasilan Utama
Strategi SO	Penetapan cagar hijau di sisa lahan pertanian via hukum tata ruang daerah dan aksi tanam komunitas lokal.	12 Bulan	Tersedianya 3 hektar cagar hijau baru dan 4 kegiatan penghijauan partisipatif per tahun.
Strategi WO	Kemitraan swasta melalui CSR untuk rehabilitasi fasilitas taman serta pelatihan SIG/QGIS bagi staf.	18 Bulan	3 taman publik direhabilitasi via dana non-APBD dan staf mampu memproduksi peta digital RTH.
Strategi ST	Patroli pengawas terpadu DPUTRPRKPLH-Satpol PP dan pembangunan pembatas fisik untuk mencegah okupasi PKL.	6 Bulan	Sterilisasi jalur hijau dari PKL ilegal dan tidak adanya penambahan kerusakan aset fisik taman.
Strategi WT	Pemusatan anggaran APBD untuk pemeliharaan rutin taman eksisting dibanding proyek pembangunan baru.	Jangka Pendek (<3 Bulan)	Alun-alun Singaparna bersih dari tumpukan sampah harian dan terpasang tempat sampah terpilah.

Formulasi matriks strategi SWOT di atas menuntut DPUTRPRKPLH untuk bertransisi dari gaya manajemen reaktif menjadi proaktif. Strategi SO mengoptimalkan legitimasi regulasi daerah untuk mengamankan lahan hijau kritis dengan menggandeng komunitas pencinta lingkungan lokal, yang secara praktis dapat meringankan biaya penanaman pohon. Strategi WO memecahkan kebuntuan keterbatasan APBD dengan memanfaatkan sumber pendanaan alternatif (CSR) dari perusahaan swasta untuk merehabilitasi fasilitas bermain dan bangku taman. Sementara itu, strategi ST dan WT diformulasikan untuk melindungi aset publik dari penyerobotan ilegal PKL secara yustisial serta merestrukturisasi manajemen keuangan dinas agar berfokus pada kelestarian fasilitas jangka panjang. Melalui pelaksanaan program SWOT yang terintegrasi ini, DPUTRPRKPLH Kabupaten Tasikmalaya dapat membangun kapasitas adaptasi organisasi yang tangguh terhadap laju urbanisasi Kecamatan Singaparna.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis efektivitas pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) oleh DPUTRPRKPLH Kabupaten Tasikmalaya di Kecamatan Singaparna menggunakan tiga dimensi Teori Efektivitas Duncan, dapat ditarik beberapa kesimpulan spesifik. Pada dimensi pencapaian tujuan, pengelolaan RTH di Kecamatan Singaparna dinilai belum efektif secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif, DPUTRPRKPLH Kabupaten Tasikmalaya belum mampu memenuhi target luasan RTH publik sebesar dua puluh persen di Kecamatan Singaparna karena laju alih fungsi lahan yang sangat tinggi akibat perpindahan pusat pemerintahan kabupaten ke wilayah ini. Secara kualitatif, fungsi ekologis RTH dalam mereduksi emisi karbon dioksida dan fungsi sosial sebagai ruang interaksi publik belum optimal akibat keterbatasan kualitas fasilitas fisik serta belum dipertimbangkannya preferensi kebutuhan spesifik masyarakat lokal dalam perencanaan pembangunan taman.

Pada dimensi integrasi, efektivitas pengelolaan juga terhambat oleh pola koordinasi kelembagaan yang masih bersifat birokratis dan sektoral. Sosialisasi kebijakan tata ruang hijau belum berjalan intensif sehingga masih terdapat mispersepsi lintas Organisasi Perangkat Daerah mengenai batas kewenangan pengelolaan lahan terbuka. Selain itu, jalinan kemitraan eksternal DPUTRPRKPLH dengan sektor swasta maupun pelibatan partisipatif masyarakat dalam pemeliharaan dan pengamanan aset taman di Kecamatan Singaparna masih sangat minim, sehingga beban operasional sepenuhnya menumpuk pada dinas. Terakhir, pada dimensi adaptasi, kapasitas organisasi DPUTRPRKPLH dikategorikan masih bersifat reaktif. Kapasitas respons terhadap ancaman kerusakan lingkungan seperti alih fungsi lahan bukit konservasi terhambat oleh keterbatasan alokasi anggaran operasional dan pemeliharaan rutin taman. Meskipun demikian, dinas memiliki peluang adaptasi yang besar melalui rencana pemanfaatan Sistem Informasi Geografis untuk pemetaan zonasi spasial serta penggunaan analisis SWOT untuk penyusunan strategi jangka panjang.

Guna meningkatkan efektivitas pengelolaan RTH di Kecamatan Singaparna ke depan, DPUTRPRKPLH Kabupaten Tasikmalaya perlu mengimplementasikan langkah-langkah strategis terintegrasi secara bertahap. Pertama, dinas harus mempercepat penyusunan zonasi RTH publik berbasis Sistem Informasi Geografis guna mengunci lahan-lahan tersisa dari ancaman alih fungsi lahan pemukiman dan komersial, serta menyelaraskan perencanaan pembangunan taman dengan preferensi kebutuhan sosial masyarakat Singaparna. Kedua, DPUTRPRKPLH harus membangun forum koordinasi terpadu lintas sektor yang melibatkan Bappeda, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP untuk menyamakan persepsi hukum tata ruang, serta menginisiasi model tata kelola lingkungan partisipatif yang merangkul sektor swasta melalui dana CSR dan komunitas lokal dalam pemeliharaan berkala taman-taman publik. Ketiga, dinas perlu mengajukan penambahan pos anggaran khusus operasional pemeliharaan aset taman untuk memastikan sarana prasarana penunjang tetap berfungsi dengan baik, serta merumuskan rencana konservasi perbukitan kritis di sekitar Singaparna untuk dialihfungsikan menjadi lanskap hutan kota pelindung daerah aliran air. Integrasi solusi-solusi adaptif ini diharapkan dapat mentransformasi peran DPUTRPRKPLH dari otoritas yang reaktif menjadi koordinator penataan lingkungan yang proaktif dan partisipatif.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DPUTRPRKPLH Kabupaten Tasikmalaya yang telah memberikan izin penelitian, keterbukaan data ketersediaan ruang terbuka hijau, serta waktu wawancara yang berharga selama proses pengumpulan data di Kecamatan Singaparna. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para staf teknis pengelola taman serta masyarakat Kecamatan Singaparna atas partisipasi aktif dan informasi berharga yang diberikan sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik.

Reference

- Andrea, D., & Bella, P. A. (2023). Evaluasi Ruang Terbuka Hijau Pada Taman Kota Waduk Pluit, Jakarta Utara. *STUPA: Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur*, 5(1), 445–456. <https://doi.org/10.24912/Stupa.V5i1.22700>
- Ashim, A. N., Agustiwi, A., & Purnomosidi, A. (2025). Implementasi Ketentuan Ruang Terbuka Hijau Oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau (Studi Di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Karanganyar). *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory (IJJEL)*, 3(3), 2523–2529. <https://doi.org/10.62976/Ijjel.V3i3.1316>
- Fitri, T. M. I., & Nurmasari. (2024). Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Studi Hutan Kota). *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(2), 247–255. <https://doi.org/10.25299/Jiap.2024.18983>
- Khoirunnisaa, T., Anjasmari, N. M. M., & Arpandi. (2024). Efektivitas Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pada Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan (Studi Kasus RTH Batumandi & RTH Taman Hijau Paringin). *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(2), 320–327. <https://jurnal.stiaamuntai.ac.id/index.php/JKP/Article/View/1063>
- Malik, Y. (2009). Konservasi Lahan Perbukitan Sepuluh Ribu (Ten Thousand Hill) Untuk Lansekap Hutan Kota Dalam Menunjang Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Geografi Gea*, 9(2), 54–65. <https://doi.org/10.17509/Gea.V9i2.1684>
- Milasari, L. A., Doviyanto, R., Tandiyu, C. T., & Nabawi, A. N. (2024). Efektivitas Fungsi Ruang Terbuka Hijau Pada Kawasan Perkotaan Samarinda. *Kurva S: Jurnal Keilmuan Dan Aplikasi Teknik Sipil*, 12(3), 122–126. <https://doi.org/10.31293/Teknikd.V12i3.8446>
- Mulyana, R., Sutrisna, P., Rahman, P. P., Padjarjani, S., & Darmawan, C. (2025). Analisis Persebaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Pusat Kota Tasikmalaya Menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) Studi Kasus: Kecamatan Cihideung Dan Kecamatan Tawang. *Geosfera: Jurnal Penelitian Geografi (Geojpg)*, 4(2), 438–446. <https://doi.org/10.37905/Geojpg.V4i2.35755>
- Nusarini, D., Astirin, O. P., & Budiastuti, S. (2018). Kecukupan Ruang Terbuka Hijau Di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya. *Seminar Nasional Pendidikan Biologi Dan Saintek III*, 229–234. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/9916>
- Pakaya, P., Lihawa, F., & Baderan, D. W. K. (2024). Efektivitas Ruang Terbuka Hijau Publik Dalam Menyerap Emisi Karbon Dioksida Untuk Mendukung Keberlanjutan Lingkungan Perkotaan. *Hidroponik: Jurnal Ilmu Pertanian Dan Teknologi Dalam Ilmu Tanaman*, 1(3), 54–75. <https://doi.org/10.62951/Hidroponik.V1i3.199>
- Putri, I. A., Sukresna, I. N. A., Pahrudin, & Suhardi, R. M. (2025). Formulating Strategy Of Green Open Space Development: A SWOT Analysis. *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(1), 27–32. <https://doi.org/10.29303/E-Jep.V7i1.04>
- Ramadhan, F., Halimah, M., & Candradewini, C. (2024). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Bandung (Studi: Pada Ruang Terbuka Hijau Publik). *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 16(1), 35–42. <https://doi.org/10.24198/Jane.V16i1.41163>
- Salsabilla, E., Puspasingtyas, A., & Wahyudi, E. (2025). Evaluasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Sustainable City Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025. *Jurnal Publik*, 19(1), 56–72. <https://doi.org/10.52434/Jp.V19i01.545>
- Syamsiar, N. R., Saputra, A. G., & Suriadi, N. A. (2024). Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Majene. *BANDAR: Journal Of Civil Engineering*, 6(1), 43–48. <https://doi.org/10.31605/Bjce.V6i1.3289>

- Wardana, K. G. T., Rivai, A., & Firmansyah, A. M. (2024). Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dalam Tata Kelola Ruang Di Kota Palu. *JPS-Journal Of Publicness Studies*, 1(4), 59–66. <https://Jurnal.Fisip.Untad.Ac.Id/Index.Php/Jps/Article/View/1627>
- Wiratama, Y. H., Sobari, W., & Mashuri, A. (2023). Penerapan Tata Kelola Lingkungan Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kabupaten Ponorogo. *Brawijaya Journal Of Social Science*, 2(2), 149–166. <https://Doi.Org/10.21776/Ub.Bjss.2023.002.02.3>
- Zadittaqwa, M., & Yusup, M. (2024). Efektivitas Operasi Dan Pemeliharaan Aset Ruang Terbuka Hijau Di Hutan Kota Caracas Kabupaten Kuningan. *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas*, 8(4), 183–192. <https://Journal.Its.Ac.Id/Index.Php/Jmaif/Article/View/9088>